

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir bulan Agustus 1945, pemerintahan republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet Presidensial dibentuk, dengan Ir. Soekarno sendiri sebagai ketuanya. Hingga pemilihan umum digelar, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk membantu Presiden dan bertindak hampir sebagai badan legislatif. Komite serupa juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Mendengar berita pembentukan pemerintah pusat di Jakarta, beberapa raja menyatakan menggabungkan diri dengan Indonesia. Sementara beberapa lainnya belum menyatakan sikap atau menolak mentah-mentah, terutama yang pernah didukung oleh pemerintah Belanda. Sebelum berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke pulau-pulau lain, banyak masyarakat Indonesia yang jauh dari ibu kota Jakarta tidak percaya. Saat berita mulai menyebar, banyak dari orang Indonesia datang untuk menyatakan diri mereka sebagai pro-republik, dan suasana revolusi menyapu seluruh negeri. Kekuatan luar di dalam negeri telah menyingkir, seminggu sebelum tentara Sekutu masuk ke Indonesia, dan Belanda telah mulai melemah kekuatannya dikarenakan perang. Di sisi lain, pasukan Jepang, sesuai dengan ketentuan diminta untuk menyerah dan meletakkan senjata, dan juga menjaga ketertiban umum.¹

¹ Umar Sabiring, Saiful dan Suparman, "Kebijakan Politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir Untuk Mempertahankan Pemerintahan RI", *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 1, No. 3, 2014, p.2-12

Ir. Soekarno menerbitkan teks proklamasi pendirian bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi tidak sepenuhnya benar bahwa Indonesia tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari lingkungan bangsa kolonial. Belanda masih belum yakin apakah Indonesia akan merayakan kemerdekaan. Di Indonesia, periode 1945-1950 sering disebut sebagai periode Revolusi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan bangsa Indonesia. Akan tetapi awal perjuangan baru bangsa ini dalam membangun sebuah tatanan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan yang diraih Indonesia merupakan hasil kerja keras dari perjuangan panjang yang telah dilalui seluruh rakyat Indonesia.²

Ketika membahas orang Indonesia yang berpartisipasi dalam revolusi, penting untuk memperhatikan perbedaan antara diplomasi dan diplomasi berbasis bersenjata. Pertemuan diplomatik adalah jenis pertemuan antar bangsa yang bersifat khas. Para wakil negara dan bangsa bertemu muka untuk membicarakan masalah-masalah kepentingan bersama. Sering kali pertemuan ini sangat formal, dengan mematuhi protokol ketat tentang perilaku masing-masing pihak, demikian pula perjanjian yang merupakan hasil pertemuan itu mengikuti peraturan yang teliti dan rapi. Mereka yang hadir dalam pertemuan diplomasi merupakan orang-orang yang memiliki tanggung jawab besar karena dari mereka tergantung nasib orang-orang banyak.³

² Adika Wahyudi dan Umi Hartati, "Peranan Sutan Sjahrir Dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945-1950," *Jurnal Sejarah*, Vol 5, No. 3, 2022, p.94

³ Wahyudi dan Hartati, "Peranan Sutan Sjahrir...", *Jurnal Sejarah*, p.97

Tujuan diplomasi itu sendiri bagi suatu negara yakni untuk menjamin keuntungan sebesar-besarnya bagi negara sendiri. Keuntungan ini mencakup masalah stabilitas keamanan, menjaga keutuhan wilayah, memajukan ekonomi perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga sendiri di negara lain, meningkatkan harkat dan ideologi, serta meningkatkan persahabatan dengan negara lainnya. Diplomasi mempunyai peran yang sangat penting ketika negara sedang berperang. Diplomasi akan menekan jatuhnya korban lebih banyak. Kedua negara yang sedang berseteru pun akan dapat mengakhiri perang tanpa harus saling membunuh. Sebagai contoh bangsa kita sendiri ketika kita baru memproklamasikan kemerdekaan, kita ternyata masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman musuh. Dalam menyelesaikan masalah itu tidak cukup hanya dengan kekuatan senjata. Tetapi harus dibicarakan di meja perundingan. Cara-cara seperti itu dinamakan perjuangan dengan cara diplomasi.⁴

Untuk menjaga perdamaian dunia negara-negara perlu mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Dengan diplomasi, Negara-negara yang sedang bertikai berusaha melakukan negosiasi dan kompromi sehingga dapat mencari jalan keluar terbaik serta damai tanpa ada peperangan. Dalam menjalankan diplomasi suatu bangsa sangat bergantung pada politik luar negeri bangsa tersebut. Sejak tahun 1945 sampai tahun 1949 berlangsung serangkaian perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda mengenai cara-cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan dekolonisasi. Perundingan-

⁴ Bertha I. Mundung Mamuaya, Nova Ch., "Pn Kepuasan Nasabah Dalam Memediasi Pengaruh Customer Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah 2" *Jurnal Sejarah dan Pendidikan*, Vol. 01, No. 3, 2023, p.31

perundingan ini senantiasa dihalangi oleh ketidaksabaran berbagai pihak di Indonesia maupun di negeri Belanda. Merupakan peranan historis dari tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Roem di satu pihak, serta Schermerhorn, van Rooijen dan van Mook di lain pihak, yang memungkinkan diatasinya hambatan-hambatan itu sehingga terhindarlah perang yang berkepanjangan.⁵

Sekalipun para anggota delegasi sering bisa menyetujui berbagai soal, pihak oposisi baik di Indonesia maupun di negeri Belanda bahkan juga di kalangan kabinet selalu mengajukan berbagai keberatan terhadap kesepakatan-kesepakatan itu serta implementasinya. Dengan demikian, realisasi persetujuan-persetujuan itu selalu terhambat, sehingga konflik-konflik senjata pun menggantikan diplomasi. Pada tahun 1947 tampak bahwa persetujuan yang didasarkan pada model yang disepakati (pemerintah peralihan, pengakuan *de facto* atas Republik Indonesia, pengakuan kedaulatan), tidak bisa terwujud. Republik Indonesia senantiasa menuntut kemerdekaan langsung.⁶

Pokok-pokok isi perundingan pada umumnya menyangkut : Sifat dan jangka waktu masa peralihan (pemerintah sementara), Status republik dalam masa peralihan itu, Bentuk politik Indonesia di kemudian hari dan Hubungan Indonesia dan Belanda.⁷ Pada bulan Maret 1946, Sutan Sjahrir yang menjabat sebagai Perdana Menteri secara rahasia telah bersepakat dengan van Mook untuk berunding atas dasar kedaulatan *de facto* Republik hanya atas Jawa, Madura, dan Sumatera, pengakuan terhadap kedaulatan Belanda di wilayah-wilayah lainnya, dan upaya bersama

⁵ Mamuaya, Nova Ch., "Peran Kepuasan Nasabah..." *Jurnal Sejarah dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 3, 2023, p.33

⁶ A.B. Lapien & P.J. Drooglever, *Menelusuri Jalur Linggarjati Diplomasi dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), p.2

⁷ Lapien & Drooglever, *Menelusuri Jalur Linggarjati*, p.3

Belanda-Republik untuk membentuk Negara Indonesia Federal di dalam suatu Uni Belanda-Indonesia. Pada bulan April 1946, dua orang menteri kabinet Indonesia menghadiri pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut, namun mengalami kemaceatan karena pemerintah Belanda sedang menghadapi pemilihan umum pada tanggal 17 Mei 1946 dan tidak bersedia memberikan konsesi-konsesi kepada pihak Republik. Hal ini meyakinkan banyak pemimpin Republik bahwa Belanda tidak akan bertindak jujur. Terlebih ketika van Mook memutuskan secara sepihak untuk membentuk sebuah Negara Indonesia Federal di bawah kekuasaan Belanda.

Akhirnya pihak Belanda mencapai kesepakatan diplomatik mereka yang pertama dengan Republik Indonesia pada bulan November 1946. Pihak Inggris telah mendesak tercapainya suatu kesepakatan sebelum menarik semua pasukan mereka dari Jawa dan Sumatera pada bulan Desember. Perundingan-perundingan dimulai dan disepakati suatu gencatan senjata di Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 12 November, di Linggarjati, Belanda mengakui Republik sebagai penguasa *de facto* di Jawa, Madura dan Sumatera, kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pembentukan Negara Indonesia serikat yang berbentuk federal. Namun pada akhirnya kedua pihak saling tidak mempercayai dan pengesahan persetujuan itu di kedua Negara menimbulkan pertikaian-pertikaian politik yang sengit mengenai konsesi-konsesi yang telah dibuat.⁸

Tanggal 15 November, naskah persetujuan tersebut diparaf oleh kedua pihak. Pokok-pokoknya diantaranya: Pertama, Belanda mengakui secara *de facto* Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang

⁸ Lapien & Drooglever, *Menelusuri Jalur Linggarjati*, p.3

meliputi Sumatera, Jawa dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah *de facto* paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negeri Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.

Setelah melalui perdebatan sengit di dalam masyarakat dan dalam lingkungan KNIP, akhirnya pada tanggal 25 Maret 1947 persetujuan Linggarjati ditandatangani di Istana *Rijswijk*, (sekarang Istana Merdeka), Jakarta.⁹

Sejumlah perundingan dilangsungkan selama periode 1946-1949, dan berakhir dengan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) perundingan-perundingan tersebut sebagai berikut : 1) Konferensi Hoge Veluwe di negeara Belanda (berlangsung pada April 1946). 2) Perundingan yang berakhir dengan Perjanjian Linggarjati (berlangsung pada bulan November 1946-Maret 1947). 3) Perundingan di atas kapal Amerika Serikat Renville (berlangsung pada Bulan Januari 1948). 4) Perundingan Roem-Roeyn (berlangsung pada bulan Mei 1949). 5) Konferensi Meja Bundar (berlangsung pada bulan Agustus-November 1949).

Penelitian tentang Perjuangan Sutan Sjahrir ini penting untuk diteliti karena, orang yang pertama melakukan perjuangan melalui diplomasi yang menjadi langkah awal bagi Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka, melalui perundingan ini mata dunia internasional menjadi

⁹ Karta Sasmita, Ginandjar, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), p.130

terbuka dan mulai mengakui kemerdekaan Indonesia dari yang tadinya hanya dianggap permasalahan internal oleh Belanda. Kedua, saat perundingan ini dapat tercapai, pihak-pihak yang berkonflik yakni Indonesia dan Belanda dapat bertemu di meja perundingan-perundingan selanjutnya sebagai wakil-wakil dua negara dan bangsa yang sama-sama merdeka dan berdaulat.¹⁰

Sutan Sjahrir yang merupakan salah satu dari tiga tokoh pimpinan revolusi kemerdekaan Indonesia ini memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan menegakkan pemerintahan republik Indonesia. Sutan Sjahrir diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia yang pertama pada tanggal 14 November 1945. Selama memimpin pemerintahan, Perdana Menteri Sutan Sjahrir memegang peranan penting, dari tahun 1945 hingga 1948, pengaruhnya sangat mendalam terhadap perjalanan revolusi Indonesia.¹¹ Sutan Sjahrir melakukan perundingan dengan pihak Belanda untuk menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia di bawah pengawasan Internasional, yaitu PBB. Sutan Sjahrir melaksanakan cara penyelesaian konflik yang berbeda dengan para tokoh revolusioner Indonesia pada saat itu seperti Tan Malaka dan yang lainnya.¹² Di saat yang lain menyelesaikan persoalan konflik dengan Belanda melalui perlawanan militer (perang), Sutan Sjahrir justru memilih jalan damai yaitu diplomasi.¹³ Inilah yang menjadi ketertarikan

¹⁰ Wahyudi dan Hartati, "Peranan Sutan Sjahrir...", *Jurnal Sejarah*, p.95

¹¹ Sutan Sjahrir. *Renungan dan Perjuangan*. (Jakarta: Djambatan, 1990), p. 283.

¹² Tokoh Revolusioner lainnya yang dimaksud adalah Sukarni, Khaerul Saleh, Adam Malik dan Jendral Soedirman yang memilih jalan aksi massa dan militer dalam perjuangan menegakkan Republik Indonesia. Lihat DR.A.Nasution. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung: DISJAHRAH-AD & Angkasa. p. 66.

¹³ Umar Sabiring, dkk, "Kebijakan Politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir Untuk Mempertahankan Kemerdekaan RI", *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, Vol. 1, No. 3, 2014, p.70.

penulis untuk menelaah diplomasi Internasional Sutan Sjahrir pada awal kemerdekaan.¹⁴

Dalam perjuangan jalur diplomasi ini antara pihak pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah kolonial Belanda berjalan dengan sangat baik, terutama masalah pengakuan kedaulatan secara *de facto*. Belanda terhadap kedaulatan pemerintah Republik Indonesia dengan cakupan wilayah atas Jawa, Madura dan Sumatera, maka perlu adanya upaya dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Selain upaya perdamaian dengan pengakuan wilayah, aksi tembak menembak antara pihak Republik Indonesia dengan pihak kolonial Belanda dihentikan sementara waktu. Saat itu aksi tembak menembak sering terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Ketegangan antara pihak Indonesia dengan Belanda dihentikan setelah adanya Perjanjian Linggarjati.¹⁵

Sebelum berlangsungnya Perjanjian, pihak Indonesia dan Belanda juga telah menyetujui Perjanjian gencatan senjata yang tujuannya adalah untuk menciptakan suasana damai sebelum berunding. Pihak Indonesia, Perjanjian Linggarjati merupakan jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, sehingga Indonesia sangat antusias dalam upaya implementasi terhadap isi Perjanjian Linggarjati terutama yang membahas mengenai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Selain menjalin Perjanjian dengan Belanda lewat Perjanjian Linggarjati, pihak pemerintah Republik Indonesia juga melakukan kerjasama dengan berbagai negara di dunia agar kemerdekaan

¹⁴ Wahyudi dan Hartati, "Peranan Sutan Sjahrir...", *Jurnal Sejarah*, p.96.

¹⁵ Wahyudi and Hartati, "Peranan Sutan Sjahrir...", *Jurnal Sejarah*, Vol. 3, No. 5, 2022, p.98

Indonesia dan negara Republik Indonesia mendapat pengakuan *de facto* Rerpublik Indonesia.¹⁶

Adapun hal yang menarik dari penelitian ini karena masyarakat umum Indonesia banyak yang belum mengetahui perjuangan-perjuangan para pahlawan pada masa revolusi, khususnya perjuangan dengan melalui perundingan-perundingan. Melalui tulisan ini penulis ingin sedikit menyampaikan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, Indonesia masih harus melalui masa perjuangan revolusi (1945-1949) dan perjuangan tersebut tidak hanya melalui pertempuran-pertempuran bersenjata saja, namun juga melalui perjuangan di meja-meja perundingan melalui delegasi-delegasinya. Hingga pada akhirnya tercapai kemerdekaan yang benar-benar berdaulat.

Seperti faktanya banyak manusia yang sekarang ini mengalami banyak kebingungan untuk memahami kehendak Tuhan yang terdapat dalam teks-teks wahyu agama yang dipeluknya, sehingga timbul keraguan terhadap kebenaran persepsi yang mereka berikan kepada ajaran agama mereka masing-masing. Sangat penting bagi manusia pada saat ini agar diperlukannya jembatan penjelas yang sesuai dengan alam pikiran manusia itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas yang membahas tokoh diplomat pertama Indonesia yaitu Sutan Sjahrir, penulis tertarik untuk meneliti tentang Sutan Sjahrir dalam skripsi yang berjudul. **“ Perjuangan Sutan Sjahrir Dalam Diplomasi Internasional Pasca Kemerdekaan Indonesia Tahun 1946-1949”**

¹⁶ Dwi Eka Sari, dkk. Tinjauan Historis Implementasi Isi Perjanjian Linggarjati Indonesia dan Belanda Tahun 1946-1947. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, Vol. 01, No. 5, 2014, p.1–13.

¹⁶ Muhammad Nandang Sunandar, “Konsep Agama dan Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2017, p.178

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Riwayat Hidup Sutan Sjahrir ?
2. Bagaimana Kondisi Bangsa Indonesia Pasca Kemerdekaan Indonesia Tahun 1946-1949 ?
3. Bagaimana Peran Sutan Sjahrir Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Melalui Jalur Diplomasi Tahun 1946-1949 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah terwujudnya redaksi yang dapat menjelaskan tentang :

1. Untuk Mengetahui Riwayat Hidup Sutan Sjahrir
2. Untuk Mengetahui Kondisi Bangsa Indonesia Pasca Kemerdekaan Indonesia Tahun 1946-1949
3. Untuk Mengetahui Peran Sutan Sjahrir Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Melalui Jalur Diplomasi Tahun 1946-1949

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of literature*) yang berfungsi di antaranya untuk mengetahui manfaat penelitian sebelumnya, menghindari duplikasi dan memberikan masalah penelitian. Sepengetahuan penulis, pembahasan tentang Perjuangan Sutan Sjahrir dalam Diplomasi Internasional Pasca Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1949, walaupun sudah ada yang

menyinggung tetapi tidak mendalami, maka dari itu saya melakukan kajian yang lebih spesifik untuk membahas lebih jauh mengenai diplomasi internasional yang dilakukan oleh Sutan Sjahrir pasca kemerdekaan Indonesia.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti banyak menggunakan referensi baik dari buku, skripsi, jurnal, dan internet. Penelitian yang menggunakan referensi ini bertujuan untuk mendapatkan tulisan yang ilmiah sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi, dari berbagai tulisan yang ditemukan ada beberapa sumber karya tulis seperti buku, skripsi dan jurnal yang mengungkapkan tema tersebut yang dapat dijadikan perbandingan oleh penulis tentang sejauh mana masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Buku yang ditulis oleh Rosihan Anwar yang berjudul Mengenang Sjahrir, yang berisikan kumpulan tulisan atau ungkapan-ungkapan orang-orang yang mengenal Sjahrir secara dekat. Mereka menuliskan pendapat mereka mengenai Sjahrir dari semasa Sjahrir kecil sampai ketika Sutan Sjahrir dipenjarakan. Sutan Sjahrir tema sentral dari kumpulan karangan buku ini adalah seorang tokoh nasional yang telah memberi arah dan isi kepada arus revolusi Indonesia dalam suatu sejarah yang penuh emosi dan juga kekacauan. Sepanjang hidupnya penuh dengan perjuangan dan juga tantangan. Dia menjadi korban oleh orang yang bersikap acuh tak acuh terhadapnya dan yang membencinya, sekaligus menjadi pujaan banyak orang yang mengagumi dan mencintainya. Meskipun demikian didalam buku ini Rosihan Anwar tidak menulis tentang dampak yang mendalam dari perjuangan Sutan Sjahrir dalam berdiplomasi terhadap kemerdekaan Indonesia

A.B. Lopian & P.J. Drooglever dalam karyanya “Menelusuri Jalur Linggarjati Diplomasi dalam Perspektif Sejarah” (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1992). Tulisan ini hanya membahas kumpulan karangan orang-orang yang terlibat dalam Perundingan Linggarjati diantaranya Alie Budiardjo dan Piet Sanders yang keduanya terlibat dalam Perundingan Linggarjati dan menjadi Sekretaris Jendral dari kedua belah pihak yang berunding. Tulisan ini menjadi referensi penulis dalam penulisan proposal penelitian ini yang akan mengulas mengenai jalannya Perundingan Linggarjati.

Aboe Bakar Loebis dalam karyanya *Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku dan Saksi*, (Jakarta: UI Press, 1992). Dalam tulisannya berisikan kesaksian beliau pada masa revolusi diantaranya peristiwa Perundingan Linggarjati pada waktu itu ia menjadi kurir atau caraka. Buku ini menjadi referensi penulis namun buku ini tidak terfokus pada jalannya Perundingan Linggarjati tersebut.

Jurnal Penelitian Koimunikasi yang ditulis oleh Yunita Endra Megiati dan Titin Ariska Sirnayatin “Peran Sutan Sjahrir dalam Perundingan Linggarjati 1947”. Program studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, yang fokus membahas tentang proses Perundingan Linggarjati dan hasilnya di tahun 1947.

Jurnal yang ditulis oleh Bernada Prihartanti Alumni Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanarta Dharma Yogyakarta Tahun 2010. Volume 24, No. 1, April 2010, yang berjudul Peranan Sutan Sjahrir Dalam Pemerintahan Indonesia (1945-1947). Jurnal yang ditulis Bernada Prihartanti ini membahas mengenai latar belakang kehidupan Sutan Syahrir, peranan Sjahrir sebagai perdana menteri serta ketua KNIP

(Komite Nasional Indonesia Pusat), dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia

Selain penelitian dan karya tulis diatas penulis juga menemukan masih banyak lagi karya yang lainnya baik berupa jurnal dan sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Walau begitu penelitian dan karya tulis yang disebutkan tadi akan berbeda dengan tulisan yang akan penulis teliti. Karya tulis yang akan diteliti dalam penelitian ini akan membahas mengenai peristiwa diplomasi-diplomasi pada masa revolusi 1946-1949 salah satunya pada peristiwa Perundingan Linggarjati yang mengawali rentetan perundingan atau diplomasi yang dilakukan Indonesia dan Belanda dalam upaya menciptakan perdamaian dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan karya tulis yang sudah ada tadi akan menjadi referensi dan sarana pendukung untuk menyelesaikan karya tulis ini.

E. Kerangka Pemikiran

Teori politik sangat dibutuhkan dalam sebuah peran penelitian untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang diberi judul Perjuangan Sutan Sjahrir dalam Diplomasi Internasional Pasca Kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Teori yang diambil yaitu teori yang akan menjelaskan tentang tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan,

lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya.

Teori adalah generalisasi (simpulan umum dari suatu kejadian, hal, dsb) yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Sutan Sjahrir melibatkan diri dalam dunia politik itu bukan karena ia haus akan kekuasaan tetapi ia merasa bahwa negara sangat membutuhkan pertolongannya banyak hal yang telah dilakukannya untuk kemerdekaan Indonesia dan kegiatannya bukan dilakukan dengan hal-hal yang negatif tapi untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya.¹⁷

Dilihat sejarah politik sangatlah menonjol pada abad ke-19 sebagai abad nasionalisme dan formasi negara nasional di Eropa Barat. Semenjak itu, sejarah perang dan diplomasi sangat menonjol di satu pihak, dan di pihak lain peranan raja, panglima perang, negarawan memegang peranan utama. Tradisi itu masih sangat kuat dikarenakan adanya anggapan ataupun teori bahwa jalannya sejarah ditentukan oleh kejadian politik, perang, serta tindakan tokoh-tokoh politik, militer, dan diplomasi. Hal ini sama dengan teori orang besar yang mengatakan bahwa orang besarlah yang bisa menentukan jalannya sejarah

Sejarah politik sebagai sejarah politik gaya baru memakai pendekatan ilmu-ilmu sosial dan dengan demikian tidak hanya memperluas cakrawala politik, tetapi juga membuat perspektif politik lebih luas, lengkap dan multidimensional, mencakup interdependensi

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), p.30

proses politik dengan jaringan sosial, sistem ekonomi, sistem nilai, dan lain sebagainya.

Di samping kegiatan politik yang baik, juga mencakup segisegi yang negatif. Hal ini disebabkan karena politik mencerminkan tabiat manusia baik nalurinya yang baik maupun nalurinya yang buruk. Perasaan manusia yang beraneka ragam sifatnya, sangat mendalam dan sering saling bertentangan, mencakup rasa cinta, benci, setia, bangga, malu, dan marah.¹⁸ Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari kita berhadapan dengan banyak kegiatan yang tak terpuji, seperti yang dirumuskan oleh Peter Merkl sebagai berikut:

Politik, dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.” singkatnya perebutan kuasa, tahta, dan harta. Ada dua sarjana yang menguraikan definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus.

Menurut Rod Hague et al.: “politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya”. Sedangkan, menurut Andrew Heywood: “politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.”¹⁹

Sutan Sjahrir merupakan salah satu tokoh besar pendiri bangsa Indonesia. Sutan Sjahrir memiliki peran yang sangat besar dalam merintis

¹⁸ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, p.35

¹⁹ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, p.37

berdirinya negeri ini. Namun saat ini banyak yang telah melupakan kiprahnya sebagai salah satu pendiri bangsa. Bahkan banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi mengenal sosoknya. Peran Sutan Sjahrir dalam proses berdirinya bangsa ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Sjahrir memegang peranan penting dalam proses tersebut. Sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, Sutan Sjahrir lah yang pertama kali menegakkan politik Luar Negeri Bebas Aktif yang dianut oleh Indonesia.

Menurut Pringgodigdo kedudukan bangsa Indonesia dimasa penjajahan Belanda sangat menderita. Segala kekayaan alam bangsa Indonesia banyak yang diambil dengan paksa oleh kaum penjajah. Kebebasan seakan tidak ada. Bangsa Belanda hanya mementingkan bangsanya sendiri, tanpa memberikan perhatian kepada bangsa yang dijajahnya. Kekerasan yang sering dilakukan bangsa penjajah telah membekas bagi rakyat Indonesia untuk tidak terulang kembali. Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia adalah serangkaian perjuangan yang sangat panjang yang harus mengorbankan segalanya demi meraih mimpi kemerdekaan yang abadi. Perjuangan bangsa Indonesia yang menuntut kemerdekaan telah menimbulkan semangat nasionalisme yang mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Rasa nasionalisme yang tumbuh dalam semangat patriotisme telah membuat rakyat Indonesia saling bekerjasama. Semangat bangsa Indonesia yang meluap saat Jepang mengaku kalah perang dan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Bangsa Indonesia yang dipelopori kaum muda dan tua yang merupakan golongan intelektual, selalu berjuang

dengan jalan perang ataupun diplomasi. Semua hal tersebut dilakukan untuk mencapai kemerdekaan yang abadi.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, karena objek yang akan diteliti adalah Tokoh dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau lampau yaitu pada tahun 1946-1949. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif melalui metode penelitian sejarah dengan empat tahap penelitian di antaranya Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.

1. Tahap Heuristik

Tahapan Heuristik ialah tahapan mencari dan pengumpulan data. Heuristik berasal dari bahasa Yunani. Yaitu *heurishein* artinya proses pencarian data atau sumber dari jejak-jejak peristiwa masa lampau baik secara tertulis maupun secara lisan.²¹ Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah untuk berburu dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti misalnya dengan melacak sumber sejarah tersebut dengan meneliti berbagai dokumen, mengunjungi situs sejarah, mewawancarai para saksi sejarah.

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang disusun oleh Sutan Sjahrir dengan judul *Renungan dan Perjuangan*. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, majalah dan artikel yang terkait, antara lain buku *Rosihan Anwar Mengenang Sjahrir, Menelusuri Jalur Linggajati: Diplomasi dalam*

²⁰ Susilo, A. & I, "Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia", *Jurnal HISTORIA*, Vol. 6, No. 2, 2018, p.403–416.

²¹ Dudung Abdurahman, "Metode Penelitian Sejarah", *Republika* (Desember 1999), p. 55

perspektif sejarah karangan A.B. Lopian dan P.J. Drooglever, jurnal Bernada Prihartanti Peranan Sutan Sjahrir dalam Pemerintahan Indonesia (1945-1947), Susilo Agus. Jurnal Penelitian Sejarah Perjanjian Linggarjati (Diplomasi dan Perjuangan Bangsa Indonesia Tahun 1946-1947), Susilo, A. & I. jurnal Historia Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia, Umar Sabiring., dkk, jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah Kebijakan Politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir untuk Mempertahankan Kemerdekaan RI. Sumber ini peneliti peroleh baik dari perpustakaan Universitas SMH Banten, perpustakaan daerah dan berbagai sumber dari Internet.

2. Tahap Kritik

Kritik merupakan tahapan untuk menguji kebenaran (validitas) dari sumber sejarah. Dalam tahap ini penulis mencari kebenaran dengan mencocokkan dengan berbagai referensi yang ada, karena banyaknya pendapat dari berbagai sejarawan makanya perlu di lihat lagi kebenarannya. Kritik dibagi menjadi dua, yaitu : Kritik ekstern merupakan kegiatan untuk menguji autentisitas (keaslian) sumber. Kritik ekstern cenderung menguji keaslian sumber sejarah dari bentuk fisiknya. Kritik intern adalah tahap dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk menguji kredibilitas dan realibilitas dari sumber sejarah. Dalam tahap ini, peneliti melakukan kritik secara kritis terhadap konten dan substansi isi dari sumber sejarah.

3. Tahap Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang telah diperoleh sebelumnya. Interpretasi adalah tahap penafsiran data dan fakta sejarah yang telah diperoleh. Interpretasi fakta sejarah

harus dilakukan dengan obyektif. Dalam buku Metodologi Sejarah (1994) karya Kuntowijoyo, interpretasi sejarah dibagi menjadi 2 macam yaitu, Interpretasi analisis berkaitan dengan upaya menjelaskan sumber-sumber yang dihimpun untuk menyusun fakta sejarah. Interpretasi sintesis Menyatukan analisis-analisis terhadap sumber yang dihimpun untuk memperoleh penulisan karya sejarah. interpretasi analisis dan interpretasi sintesis.

Dalam tahap ini, penulis memberikan penafsiran terhadap sumber dan fakta yang telah dikumpulkan dan dikritik. Fakta-fakta yang didapat dan dikumpulkan dari berbagai sumber diantaranya sumber tertulis buku-buku jurnal-jurnal, majalah dan artikel-artikel yang didapat. Semua rentetan perjuangan diplomasi yang dilakukan para delegasi Indonesia tersebut dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang benar-benar bedaulat. Penulis mencoba menafsirkannya dengan pemikiran dan bahasa penulis sendiri dengan harapan mencapai taraf “mendekati” kebenaran dan dapat diterima oleh khalayak umum

4. Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan atau pelaporan penelitian sejarah dengan merangkai fakta-fakta menjadi kisah sejarah berdasarkan data-data yang telah dianalisa.²² Dalam tahap historiografi, peneliti menuliskan hasil pemahaman dan interpretasi atas fakta-fakta sejarah dalam bentuk analisis naratif deskriptif yang menarik, logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melihat tahapan-tahapan ini tidaklah mengherankan apabila dikatakan bahwa kerja seorang sejarawan untuk menghasilkan sebuah hasil karya ilmiah yang bernilai historis. Dalam

²² Gama Prabowo, “Metode penelitian sejarah” *Jurnal metodologi penelitian kualitatif*, 2019,p.1-5

tahapan historiografi ini mencakup cara penulisan, pemaparan atau laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.

Pada tahapan ini hasil penafsiran atas fakta-fakta dituliskan menjadi suatu kisah sejarah yang selaras, tahap ini merupakan tahap merangkai fakta berikut maknanya secara kronologis atau diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah menjadi kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-bener tampak karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu. Selain kedua hal tersebut penulisan sejarah, khususnya pada sejarah yang bersifat ilmiah juga harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah, yaitu sebagai berikut: 1) Bahasa yang digunakan harus dengan bahasa yang baik dan benar menurut kaidah yang bersangkutan, karya ilmiah ini harus dengan kalimat efektif. 2) Memperhatikan konsistensi antara lain dalam penempatan tanda baca, penggunaan istilah dan penunjukkan sumber. 3) Istilah serta kata-kata harus sesuai dengan kaidah maupun pedoman yang berlaku, termasuk penulisan pedoman bibliografi atau daftar pustaka, daftar sumber.

Kaidah-kaidah tersebut harus benar-bener dipahami dan diterapkan, karena kualitas karya ilmiah bukan hanya terletak pada masalah yang dibahas, tetapi ditunjukkan pula oleh format penyajiannya. Tahap ini merupakan langkah bagaimana penulis mengkomunikasikan hasil penelitiannya untuk diketahui oleh umum.²³

G. Sistematika Penulisan

²³ Muhamad Nandang Sunandar, *Pengantar Historiografi*, (Serang, Media Madani : 2021), p. 68-70

Dalam pembahasan ini, penulis membagi kedalam lima bab, yang masing-masing terdapat beberapa sub yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II memuat Riwayat Hidup Sutan Sjahir yang berisi tentang asal-usul Sutan Sjahrir, Riwayat Pendidikan Sutan Sjahrir dan Karya-karya Sutan Sjahrir.

Bab III memuat tentang Kondisi Bangsa Indonesia Pasca Kemerdekaan Indonesia Tahun 1946-1949, meliputi Situasi Politik Bangsa Indonesia, Situasi Pendidikan Keagamaan Bangsa Indonesia dan Situasi Sosial Ekonomi Bangsa Indonesia Tahun 1946-1949

Bab IV memuat tentang Peran Sutan Sjahrir Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Melalui Jalur Diplomasi Tahun 1946-1949 meliputi : Peran Sutan Sjahrir dalam Konferensi Hoge Veluwe Tahun 1946, Peran Sutan Sjahrir dalam Perjanjian Linggarjati Tahun 1946-1947, Peran Sutan Sjahrir dalam Perjanjian Renville Tahun 1948, Peran Sutan Sjahrir dalam Perjanjian Roem-Royen Tahun 1949 dan Peran Sutan Sjahrir dalam Konferensi Meja Bundar Tahun 1949.

Bab V meliputi Kesimpulan dan Saran-saran dari apa yang sudah ditulis oleh penulis tentang Perjuangan Sutan Sjahrir dalam Diplomasi Internasional Pasca Kemerdekaan Indonesia Tahun 1946-1949.